

## RESENSI BUKU

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Judul Buku</b> | : KEBUDAYAAN DALAM POLITIK:<br>KRITIK PADA DEMOKRASI |
| <b>Penulis</b>    | : Noam Chomsky                                       |
| <b>Penerjemah</b> | : Tia Setiadi                                        |
| <b>Penerbit</b>   | : Bentang Pustaka                                    |
| <b>Cetakan</b>    | : Pertama, Februari 2015                             |
| <b>Tebal</b>      | : xii+444 halaman                                    |
| <b>ISBN</b>       | : 978-602-291-059-6                                  |



### Mimpi-mimpi Demokrasi

Dr. Kelly S. Meier, menyampaikan ada empat saka guru utama yang menyokong suksesnya sebuah sistem demokrasi. Yakni, *Protective*, *Pluralist*, *Developmental*, dan *Participatory*. Keempatnya menjadi ciri utama sekaligus syarat keberlangsungan demokrasi. Bila satu atau beberapa syarat tidak berjalan maksimal, maka perlu dipertanyakan apakah itu demokrasi atau justru oligarki.

Seperti dalam *protective*, secara sederhana pemerintah harus menjaga hak setiap warga negara dan menjaga agar muncul *free market* yang justru menebas hak-hak pribadi, terutama bagi kalangan tidak berkapital besar. Pemerintah sebagai aktor utama penegakan demokrasi haruslah menjaga keempat ciri utama tersebut.

Masyarakat adalah *outsider* yang bertugas melakukan kontrol dan pemberi masukan. Seperti yang dilakukan oleh budayawan serba bisa, Radhar Panca Dahana dalam buku *Kebudayaan Dalam Demokrasi* ini. Esai-esai dalam buku ini lebih seperti wakil suara-suara rakyat kecil terhadap pemerintah dan ketidakjelasan demokrasi. Di negara kita, banyak sekali fenomena penyelewengan atas sistem demokrasi yang adiluhung. *Money politic* saat pemilu, korupsi, kebebasan individu yang kebablasan, lantas tertutupnya muara rakyat kecil untuk menyuarakan keluhan. Itu hanya beberapa contoh kesalahan yang dilakukan pemerintah terhadap sistem demokrasi.

Esai-esai Radhar Panca Dahana dalam buku ini adalah hasil buah pemikiran karena sistem demokrasi yang masih jauh panggang dari api. Di Indonesia, demokrasi mengandung harapan dan kecewa. Ikhtiar menjadi negara demokratis cenderung ilusi ketimbang pembuktian. Sejak kemunculan idiom demokrasi melalui buku, surat kabar, brosur, pidato, dokumen resmi negara, demokrasi adalah pusat perdebatan tak pernah selesai. Saat pelaksanaan sudah digadang-gadang menjadi perubahan besar, justru di sana-sini tampak cacat pelanggaran dari empat saka guru demokrasi.

Radhar Panca Dahana dengan buku ini tampil dengan ratusan esai untuk mengingatkan sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi tak seperti roman asmara: melenakan dan mengharukan. Demokrasi adalah situasi tak keruan, sejak para elite terpelajar dan penggerak politik kebangsaan mengandaikan Indonesia itu adil dan makmur, berpijak pada nilai-nilai demokrasi.

Sejak awal abad XX, demokrasi di Indonesia mengalami evolusi makna, tergantung pada pola kepemimpinan. Keberakhiran kolonialisme tak menggampangkan ilusi kemerdekaan. Kepemimpinan Soekarno sampai SBY masih menampilkan demokrasi sebagai **"mantra" untuk merenggut kebebasan. Demokrasi sekadar kamuflase pelaksanaan program-program ambisius bercorak hegemonik: sinergi politik dan ekonomi. Kembali demokrasi hanya diperalat untuk tujuan koomersial seorang pemimpin.**

Keruntuhan rezim Orde Baru mengembalikan lagi janji kebebasan. Orang-orang bermunculan untuk jadi pemimpin. Ratusan partai politik dan ribuan tokoh bersaing mencicipi dan merebut kekuasaan. Usaha pasca Orde Baru ini seolah menampakkan saka guru demokrasi *protective*, yakni melindungi hak setiap warga negara dalam hal politik.

Namun Radhar Panca Dahana tampil dengan prasangka **bahwa ini "mungkin buah demokrasi paling asam."** Pemahaman tentang adab, keadilan, sejarah, filosofi hidup terasa dangkal dan mentah saat diekspresikan para pendamba kekuasaan. Mereka tergelincir ke jurang kenadiran, tak mengerti hakikat hidup berbangsa-bernegara. Dalih meraih jabatan melalui sistem demokrasi adalah omong kosong besar. Mereka memang mendapat suara tapi gagal mengerti peran memimpin alias menjalankan amanah kekuasaan.

Radhar mengingatkan kita tak terlalu menginginkan pemimpin bermodal teknis atau intelektual dalam membereskan soal-soal kenegaraan dan kebangsaan berwujud statistik.

### Mata Budaya

Dalam sebuah budaya adalah sisi lembut yang tidak bisa dicampuri dengan urusan politik. Namun Radhar Panca Dahana menempatkan budaya sebagai salah satu metode kritik lembut. Budaya dan kesenian bisa dipergunakan sebagai salah satu media untuk mengkritik pemerintah yang sudah melenceng dalam melaksanakan sistem demokrasi. Seharusnya sistem demokrasi menyuguhkan media massa sebagai pengontrol. Namun di Indonesia sendiri media sudah menjadi bagian dari aktor politik dan tertutup oleh banyak kepentingan pemodal. Maka diperkenankan meminjam kalimat Seno Gumira Ajidarma, bila jurnalisem dibungkam, sastra, seni dan budaya berbicara.

Dalam buku *Civic Culture* karya Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) dijelaskan bahwa budaya politik merujuk pada perilaku terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta perilaku diri terhadap sistem tersebut. Pertanyaannya adalah "Apakah pola perilaku politik bisa membantu **perkembangan stabilitas demokrasi?**".

Sikap kritis dan esai-esai tajam Radhar Panca Dahana bisa dikategorikan sebagai sikap budaya yang mencoba melakukan kiritk terhadap sistem demokrasi yang keliru.

### Kritik Tajam

Buku ini berisi kritik-kritik pada demokrasi. Kritik berbahasa puitis, reflektif, satire, dan menghantam. Radhar mengajak pembaca berpijak ke kebudayaan ketimbang menganut paham paham politik belepotan.

Kemauan menjadi negara demokratis memerlukan modal besar. Modal itu uang dan kesediaan orang-orang **memberi suara. Demokrasi mirip "barang mewah", diadakan** dengan tipuan dan janji tanpa ditepati. Radhar menganggap pemikiran dan ulah para elite politik semakin menjadikan demokrasi bermakna buruk.

Ocehan-ocehan menjelang pemilu atau pilkada sering jadi representasi ketakpahaman demokrasi atau siasat licik mencapai kekuasaan.

Pada abad XXI, demokrasi di Indonesia masih berisi himpunan dusta. Pergantian presiden sampai lurah tak memberi kepastian ada pendidikan adab berdemokrasi. Kepastian cuma politik berwujud **"jual-beli" atau pamer dominasi.**

Demokrasi memang dituliskan di spanduk atau diucapkan saat pidato untuk **"pantas-pantas saja".** Penulisan dan pengucapan demokrasi semakin laris berbarengan involusi makna. Di Indonesia, demokrasi masih sejenis sihir, belum etos dan pemikiran untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Kritik mesti terus diajukan agar demokrasi tak terlalu jadi milik kaum elite untuk dilaksanakan dengan dusta-dusta (Teguh Afandi).